

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi memiliki tujuan strategis yang harus dicapai. Kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan kerjanya guna mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki supaya mencapai hasil yang optimal. Efisiensi kerja merupakan prinsip dasar organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan usaha seminimal mungkin, namun tetap mencapai hasil yang maksimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Haumahu et al., 2023). Prinsip efisiensi ini mencakup kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi (Stoner, 2010).

Menurut Robbins dan Coulter (2020), efisiensi pada organisasi berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya secara hemat, termasuk tenaga kerja, waktu, serta fasilitas yang tersedia. Efisiensi juga mencerminkan sejauh mana organisasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan kinerja karyawan melalui pemanfaatan teknologi dan strategi manajerial yang tepat. Dalam konteks modern, penerapan sistem digital, otomatisasi, dan metode kerja berbasis teknologi informasi menjadi faktor krusial untuk meningkatkan efisiensi organisasi (Drucker, 2012).

Menurut Ralph M. Barnes dalam Sedarmayanti (2018), efisiensi kerja dapat dicapai salah satunya melalui penggunaan alat kerja yang tepat. Saat ini penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi fenomena global yang tidak bisa dihindari oleh berbagai sektor sebagai penunjang segala macam kegiatan operasional organisasi. Salah satu produk dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut yaitu berupa sistem informasi. Sistem informasi dibangun sebagai alat kerja pendukung kinerja dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan jika sistem informasi dimanfaatkan secara efektif, maka organisasi dapat mencapai berbagai manfaat, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi

operasional yang lebih besar, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat (Setiawan et al., 2024). Dengan begitu, telah banyak organisasi yang berusaha memanfaatkan sistem informasi dengan efektif, tak terkecuali dalam instansi pemerintahan.

Dalam konteks instansi pemerintah, efisiensi kerja menjadi elemen penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjalankan tugas pengabdian kepada negara. Seperti yang diungkapkan oleh (Kajual et al., 2017), efisiensi kerja sangat mendukung keberhasilan organisasi, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas layanan publik. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yaitu melalui penerbitan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi juga mendorong instansi untuk dapat beradaptasi dengan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya, salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government juga dijelaskan bahwa melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pada sebuah instansi pemerintahan, teknologi informasi dimanfaatkan sebagai alat kerja untuk mendukung efisiensi berbagai aktivitas, salah satunya pada pengelolaan arsip melalui pemanfaatan teknologi sistem kearsipan elektronik. Hal ini sudah sejalan dengan penggunaan sistem informasi pada poin nomor satu (1) yang telah disebutkan dalam Instruksi Presiden, karena pengelolaan arsip melibatkan pengolahan data dan pengelolaan informasi yang ada dalam proses kerjanya.

Beberapa alasan perlunya penanganan arsip secara elektronik adalah: (1) Perkembangan kehidupan sekarang ini berada dalam lingkungan teknologi, misalnya kartu-kartu identitas dengan *barcode* untuk bertransaksi dengan bank (ATM) atau perpustakaan, kereta api, dan pesawat. (2) Semakin tinggi pertumbuhan volume arsip dalam organisasi, sehingga membutuhkan banyak tempat. (3) Semakin bervariasi jenis teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai dan staf seperti *word processing*, *text retrieval*, *email*, basis data (Muhidin et al., 2016). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip dapat memberikan keuntungan dengan mengurangi beban kerja manual yang selama ini menjadi tantangan ketika pengelolaan arsip masih secara konvensional. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan menurut Priansa dan Garnida (2019) bahwa sistem pengarsipan elektronik yang telah berkembang memiliki banyak variasi dan membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan, juga untuk kantor-kantor yang memerlukan pelayanan yang cepat dengan volume arsip yang tinggi, menggunakan sistem kearsipan elektronik ini akan meringankan atau mempermudah proses kerja. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip menjadi langkah strategis untuk dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai.

Salah satu instansi yang berperan dalam pengelolaan kearsipan di tingkat daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispupip) Kabupaten Bandung. Dispupip Kabupaten Bandung merupakan sebuah instansi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tercantum juga dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pasal 1 Angka 25 bahwa Dispusip Kabupaten Bandung sebagai lembaga kearsipan daerah memiliki peran penting sebagai unit pelaksana penyelenggaraan kearsipan, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan di daerah yang mengacu kepada penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional dan didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya. Salah satu aspek sarana dan prasarana yang mendukung peran Dispusip Kabupaten Bandung sebagai pelaksana penyelenggaraan kearsipan yaitu melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip yang berbasis web yaitu Silancar Bedas (Sistem Informasi Layanan Cepat Arsip Bedas).

Silancar Bedas merupakan salah satu Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) yang diterapkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Penggunaan Sistem Informasi Layanan Cepat Arsip (Silancar) Bedas dalam pengelolaan kearsipan dilakukan selain sebagai komitmen mewujudkan program *e-government* yang baik, juga karena dalam pelaksanaan kerjanya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung memperhatikan aspek efisiensi untuk menunjang tercapainya tugas pokok dan tujuan instansi. Dalam konteks ini, efisiensi kerja menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana instansi berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Efisiensi kerja dapat dicapai apabila sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal dengan usaha semaksimal mungkin. Sedarmayanti (2017) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan cara bekerja yang sederhana, penggunaan alat yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas, serta menghemat gerak dan tenaga, maka seseorang dapat dikatakan bekerja dengan efisien. Selain itu, menurut Mulyadi (2007) efisiensi seringkali dikaitkan dengan ukuran kinerja suatu organisasi karena konsep efisiensi berkaitan dengan seberapa jauh mengonsumsi masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu, sehingga untuk dapat mengetahui pencapaian efisiensi kerja pegawai itu sendiri dapat dilihat melalui data hasil pencapaian sasaran kerja dalam rentang waktu tertentu.

Dalam instansi pemerintah, dilakukan proses penilaian secara sistematis untuk pegawai negeri sipil berupa penilaian prestasi kerja yang terdiri dari dua unsur; sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Adapun penilaian sasaran kerja pegawai meliputi beberapa aspek yang menjadi penilaian, yaitu kuantitas, kualitas waktu, dan biaya. Sehingga aspek-aspek yang menjadi penilaian sasaran kerja pegawai tersebut dapat menggambarkan kondisi efisiensi kerja pegawai. Dengan begitu, peneliti mengambil sampel data penilaian pencapaian sasaran kerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung pada tahun 2020-2024 berikut.

Tabel 1. 1
Penilaian Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung

No.	Tahun	Target Sasaran Kerja Pegawai (%)	Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai (%)
1	2020	100	86,15
2	2021	100	87,50
3	2022	100	86,23
4	2023	100	88,99
5	2024	100	89,25

Sumber: Data Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai capaian sasaran kerja pegawai setiap tahunnya selalu berada di bawah target 100 persen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, capaian dengan nilai antara 76–90 dikategorikan sebagai “Baik”, yang berarti hasil kerja masih memiliki satu atau dua kesalahan kecil. Artinya, secara umum pegawai belum mampu mencapai performa kerja optimal atau "Sangat Baik", dan hal ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam efisiensi kerja. Berikut merupakan kriteria penilaian terkait target toleransi sasaran kerja pegawai negeri sipil yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun.

Tabel 1. 2
Standar Nilai Prestasi Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2011

Nilai	Kategori	Keterangan
91 – 100	Sangat Baik	Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan diatas sstandar yang ditentukan dan lain-lain.
76 – 90	Baik	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
61 – 75	Cukup	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
51 – 60	Kurang	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
50 ke bawah	Buruk	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan bsar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan di bawh standar yang ditentukan dan lain-lain.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

Ketidaksesuaian keadaan nyata yang terjadi menunjukkan bahwa efisiensi kerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung masih belum maksimal karena adanya ketidaksesuaian antara target dan capaian tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya belum sepenuhnya optimal. Permasalahan tersebut diperkuat melalui hasil observasi yang menunjukkan ketimpangan antara jumlah pegawai dengan beban kerja yang ada.

Diketahui bahwa unit kerja bidang kearsipan yang idealnya dipisahkan menjadi dua bidang, yaitu bidang arsip statis dan bidang arsip dinamis, saat ini masih disatukan dalam satu struktur yang berakibat pada beban kerja terlalu luas. Selain itu, yang menyebabkan inefisiensi pekerjaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung juga terlihat nyata melalui jumlah pegawai yang tidak

seimbang dengan beban kerja yang ada karena struktur organisasi belum ideal tersebut.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyoroti bahwa banyak instansi pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam hal distribusi kerja. Kondisi ini sebagaimana berdasarkan berbagai kajian tentang manajemen PNS terkait jumlah dan formasi kebutuhan PNS yang selalu menunjukkan bahwa salah satu penyebab inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan karena alokasi/distribusi PNS yang tidak merata, dan tidak terpenuhinya kualitas jabatan dengan kompetensi PNS (Rakhmawanto, 2016)

Selain itu untuk mengetahui kondisi efisiensi kerja, peneliti melakukan pra-penelitian melalui penyebaran kuesioner terkait pemanfaatan Silancar Bedas sebagai salah satu alat kerja yang menunjang efisiensi kerja pegawai.

Tabel 1. 3
Hasil Kuesioner Pra Penelitian terkait Performa Silancar Bedas

No	Pernyataan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Isi sistem (<i>Content</i>)	15	5	75	25
2	Akurasi (<i>Accuracy</i>)	15	5	75	25
3	Tampilan Sistem (<i>Format</i>)	16	4	80	20
4	Kemudahan Penggunaan (<i>Easy of Use</i>)	19	1	95	5
5	Ketepatan Waktu (<i>Timeliness</i>)	17	3	85	15

Sumber: Hasil pengolahan data jawaban responden

Hasil pra-penelitian dari 20 narasumber yang merupakan pengguna Silancar Bedas tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan Silancar Bedas belum sepenuhnya mencapai target 100% yang diharapkan oleh instansi untuk memberikan keunggulan performa yang dirasakan oleh penggunanya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut terkait pemanfaatan sistem informasi tersebut.

Jika pemanfaatan sistem kearsipan elektronik seperti Silancar Bedas tidak dikaji secara mendalam, maka instansi pemerintah berisiko menghadapi stagnansi dalam peningkatan efisiensi kerja, di mana sistem hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa memberikan dampak yang nyata terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Sejalan dengan pendapat Laudon dan Laudon (2018), sistem informasi seperti sistem kearsipan elektronik memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi kerja karena mampu menggantikan proses manual dengan otomatisasi yang lebih cepat dan akurat. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila sistem digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, jika Silancar Bedas tidak dievaluasi dan dimaksimalkan, maka instansi secara tidak langsung juga gagal mendukung implementasi berbagai regulasi nasional terkait penyelenggaraan *e-government*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penggunaan Sistem Kearsipan Elektronik Berbasis Web Silancar Bedas Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mendukung terciptanya *e-government* yang baik di Indonesia dan menjunjung nilai efisiensi dalam pelaksanaan kerjanya. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi pokok penelitian ini yakni mengenai belum optimalnya tingkat efisiensi kerja pegawai. Efisiensi kerja merupakan usaha penggunaan sumber daya dan waktu yang ada seminimal mungkin untuk mendapat hasil pekerjaan yang maksimal, sehingga permasalahan efisiensi kerja ini merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan atensi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik serta tercapainya tujuan organisasi dengan optimal.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja pegawai, diantaranya menurut Ralph M. Barnes dalam Sedarmayanti (2018) efisiensi kerja dipengaruhi gerakan tubuh, pengaturan tempat kerja, dan penggunaan alat kerja.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membatasi penelitian dengan faktor alat kerja yang digunakan dalam pekerjaan yang mempengaruhi efisiensi kerja.

Maka berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran efektivitas penggunaan sistem kearsipan elektronik berbasis web Silancar Bedas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana gambaran tingkat efisiensi kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung?
- 3) Apakah terdapat pengaruh antara penggunaan sistem kearsipan elektronik berbasis web Silancar Bedas terhadap efisiensi kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan kajian ilmiah lebih dalam mengenai penggunaan sistem informasi kearsipan elektronik. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan sistem informasi kearsipan elektronik terhadap efisiensi kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.

Secara khusus, penelitian ini juga dilakukan untuk mencapai tujuan berikut:

- 1) Mengetahui efektivitas penggunaan sistem kearsipan elektronik berbasis web Silancar Bedas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.
- 2) Mengetahui tingkat efisiensi kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.
- 3) Mengetahui pengaruh antara penggunaan sistem kearsipan elektronik berbasis web Silancar Bedas terhadap efisiensi kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan serta kajian lebih lanjut terkait konsep dan teori ilmu manajemen perkantoran, khususnya yang berkaitan dengan sistem kearsipan elektronik dan efisiensi kerja pegawai.

2) Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan dalam mengetahui pengaruh sistem kearsipan elektronik berbasis web Silancar Bedas terhadap efisiensi kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi dan informasi bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung untuk bahan pertimbangan dalam optimalisasi penerapan sistem kearsipan elektronik serta peningkatan efisiensi kerja pegawai. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pegawai sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mendukung tercapainya visi dan misi instansi.

c. Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan sumber acuan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti permasalahan sejenis.